



Keberhasilan La Via Campesina sebagai Gerakan Petani Transnasional dalam Memajukan Agenda Kedaulatan Pangan di Ekuador

Gunawan Lestari Elake^{1*}, Ferdiansyah Rivai¹, Retno Susilowati¹

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya, 30128, Sumatera Selatan-Indonesia

INFO ARTIKEL

Dikirim: Feb 28, 2024

Diterima: Jul 02, 2024

Dipublikasi: Jul 31, 2024

KATA KUNCI:

Food Sovereignty; La Via Campesina; Transnational Peasant Movement; 2008 Constitution of Ecuador.

KORESPONDEN:

Gunawan Lestari Elake
Universitas Sriwijaya.

Email:

gunawanlestarielake@fisip.unsri.ac.id

SITASI CANTUMAN:

Elake, G. L., Ferdiansyah, R., & Susilowati, R. (2024). Keberhasilan La Via Campesina sebagai Gerakan Petani Transnasional dalam Memajukan Agenda Kedaulatan Pangan di Ekuador. *Journal of Political Issues*, 6 (1); 87-98. <https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.198>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.198>

LISENSI:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract This research aims to understand the struggle of peasant organizations affiliated with La Via Campesina in Ecuador to successfully incorporate the food sovereignty agenda into the 2008 Ecuadorian Constitution. The theoretical framework utilized is social movements, emphasizing the structural elements of mobilization to comprehend the emergence and development of a social movement in advancing their political agendas. This study employs a qualitative method, specifically a case study approach. Data collection involves a documentation study utilizing techniques for secondary data analysis. The findings of this research indicate that several factors contributed to this success, namely: (a) the role of LVC in promoting the concept of food sovereignty globally, which subsequently served as a point of reference for member organizations' efforts at the national level; (b) the organization's capability to mobilize resources and networks; and (c) active mobilization and direct participation in the constitutional drafting process, leveraging political opportunities during Rafael Correa's administration.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memahami perjuangan organisasi-organisasi petani anggota La Via Campesina di Ekuador sehingga berhasil mengintegrasikan agenda kedaulatan pangan ke dalam Konstitusi Ekuador 2008. Kerangka teoritis yang digunakan adalah gerakan sosial dengan berfokus pada elemen struktur mobilisasi untuk memahami kemunculan dan perkembangan sebuah gerakan sosial dalam memperjuangkan agenda-agenda politiknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sementara teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dengan teknik analisis data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut ditopang oleh sejumlah faktor, yakni (a) peran LVC dalam mendesiminasi gagasan kedaulatan pangan di tingkat global, yang pada gilirannya menjadi point of reference bagi perjuangan organisasi anggota di tingkat nasional, (b) kapasitas organisasi dalam memobilisasi sumberdaya jaringan, dan (c) mobilisasi dan partisipasi langsung dalam proses legal drafting konstitusi dengan memanfaatkan terbukanya kesempatan politik di bawah pemerintahan Rafael Correa.

TENTANG PENULIS:

Gunawan Lestari Elake, adalah dosen pada program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Ia menyelesaikan gelar sarjananya pada tahun 2007 di Universitas Hasanuddin. Selanjutnya, ia menempuh program master Hubungan Internasional dan meraih gelar Master of Arts dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017.

Ferdiansyah Rivai, adalah dosen di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. ia menempuh program master Hubungan Internasional dan meraih gelar Master of Arts dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014.

Retno Susilowati, adalah dosen di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Ia menyelesaikan studi Magister Manajemen di Univeristas Sriwijaya pada tahun 2013.

PENDAHULUAN

Sejumlah ilmuwan sosial telah lama memperkirakan pudar dan lenyapnya kaum tani sebagai akibat yang tak terelakan dari penetrasi kapitalisme pada sektor pertanian (Hobsbawm, 1996; Kautsky, 1988). Meskipun demikian, panorama politik global kontemporer menunjukkan kenyataan yang nampak berbeda, jauh dari lenyap kaum tani justru menunjukkan signifikansinya, mereka mengorganisir diri dan melampaui batas-batas lokalitasnya dengan membentuk jaringan dan aliansi gerakan petani di tingkat global sebagai respon terhadap tata ekonomi politik global neoliberal yang memarjinalisasi kepentingan mereka (Dunford, 2016; Edelman & Borras, 2016). Bagi sebagian ilmuwan hubungan internasional fenomena ini dimengerti dengan istilah ‘globalisasi dari bawah’ sebagai perlawanan terhadap ‘globalisasi dari atas’ yang semata-mata bertumpu pada logika kapitalisme-neoliberal dan kepentingan korporasi global (Baylis et al., 2017). Margaret E. Kieck dan Kathryn Sikkink (Keck & Sikkink, 1999) menyebutnya sebagai jaringan advokasi transnasional, sementara Sidney Tarrow (2011) menggunakan istilah *Transnational Activism*, yakni proses transformasi aktor gerakan sosial lokal menjadi berkarakter lintas batas.

La Via Campesina (LVC) merupakan salah satu organisasi penting yang mewarnai dinamika gerakan petani di tingkat global. Organisasi ini merupakan sebuah koalisi global yang menyatukan jutaan petani kecil dan menengah, petani tanpa tanah, perempuan dan pemuda pedesaan, masyarakat adat, imigran dan pekerja pertanian. Berdiri pada tahun 1993 di Mons Belgia, organisasi ini menghimpun sekitar 182 organisasi lokal dan nasional di 81 negara dari Afrika, Asia, Eropa dan Amerika, yang kesemuanya mewakili sekitar 200 juta petani. Setidaknya terdapat tiga agenda penting yang diperjuangkan oleh gerakan ini, yakni (1) kedaulatan pangan (*food sovereignty*) dan reforma agraria; (2) mempromosikan agro-ekologi dan mempertahankan benih lokal, dan; (3) mempromosikan hak-hak petani. Gerakan ini bersifat otonom, pluralis, multikulturalis serta menerapkan model kepemimpinan yang terdesentralisasi (Claeys, 2013; Rosset, 2013). Sekretariat internasional dirotasi sesuai dengan keputusan kolektif yang dibuat setiap empat tahun melalui Konferensi Internasional. Pertama kali berlokasi di Belgia (1993-1996), kemudian di Honduras (1997-2004), Indonesia (2005-2013), di Harare, Zimbabwe (2013 – 2021), dan sejak 2021 sekretariat berpindah ke Prancis (*La Via Campesina*, 2022; Rosset, 2013).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kedaulatan pangan merupakan salah satu agenda penting organisasi ini. Istilah ini merujuk pada pengertian bahwa orang-orang yang memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi makanan harus memiliki kendali atas mekanisme dan kebijakan produksi dan distribusi makanan, ketimbang korporasi dan institusi pasar diyakini mendominasi sistem pangan global saat ini (Borras Jr et al., 2015). Secara umum, prinsip-prinsip kedaulatan pangan terdiri dari: (1) hak atas pangan untuk semua; (2) dukungan dan penghormatan terhadap kedaulatan produsen pangan; (3) sistem pangan lokal (menentang ketergantungan terhadap perusahaan agribisnis transnasional); (4) kontrol lokal terhadap sumberdaya alam dan lahan (menentang privatisasi dan eksploitasi, mendorong akses atas tanah); (5) pengembangan dan pertukaran pengetahuan lokal (menolak teknologi yang mengancam hal tersebut, seperti rekayasa genetika); dan (6) mempromosikan praktik agro-ekologi (Claeys, 2015).

Perjuangan global kedaulatan pangan pertama kali dilakukan *La Via Campesina* dimulai sejak World Food Summit (WFS) yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Dunia (FAO) di Roma, Italia tahun 1996. Sejumlah pencapaian penting dari kampanye ini adalah: adopsi konsepsi kedaulatan pangan oleh *International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development* (IAASTD) (Walsh-Dilley et al., 2016), keterlibatan LVC dalam tata kelola Komite Pangan Dunia (CFS) FAO yang berhasil memasukan agenda kedaulatan pangan ke dalam Panduan Tata Kelola yang Bertanggung Jawab atas Penguasaan Tanah, Perikanan dan Hutan dalam Konteks Ketahanan Pangan (VGGT) tahun 2012, dan kesepakatan

Gunawan Lestari Elake, Ferdiansyah R, Retno Susilowati.

Keberhasilan *La Via Campesina* sebagai Gerakan Petani Transnasional dalam Memajukan Agenda Kedaulatan Pangan di Ekuador

kerangka institusional kedaulatan pangan antara LVC dan FAO tahun 2013 (Elake et al., 2022). Selain itu, melalui perjuangan organisasi anggota di tingkat nasional, LVC relatif berhasil mendorong integrasi agenda kedaulatan pangan ke dalam konstitusi dan undang-undang nasional di sejumlah negara, yakni; Venezuela, Mali, Bolivia, Nepal, Senegal, dan Mesir (Claeys, 2013; European Cordination Via Campesina, 2018).

Berkaitan dengan pencapaian terakhir tersebut, salah satu yang paling monumental adalah keberhasilan LVC melalui organisasi anggotanya di Ekuador dalam mengintegrasikan konsep dan agenda kedaulatan pangan ke dalam Konstitusi Baru (undang-undang dasar) Ekuador 2008. Konstitusi baru ini merupakan hasil dari rangkaian panjang proses politik di Ekuador sepanjang tahun 2007-2008, yang melibatkan dua kali refererendum yakni referendum pembentukan Majelis Konstituante (*Constituent Assembly*) untuk menyusun draft konstitusi pada tahun 2007, dan referendum persetujuan konstitusi baru tersebut pada akhir 2008 (Martínez Dalmau, 2016). Dalam konstitusi baru ini terdapat sejumlah pasal dalam konstitusi secara jelas dan rinci mengamankan hak rakyat, kewajiban dan strategi negara mengenai kedaulatan pangan. Pada pasal 13 misalnya, dinyatakan bahwa “Setiap orang dan kelompok masyarakat memiliki hak atas akses yang aman dan permanen terhadap makanan yang sehat, cukup dan bergizi, lebih mengutamakan produksi lokal dan sesuai dengan beragam identitas dan tradisi budaya mereka. Negara Ekuador wajib mempromosikan kedaulatan pangan ” (Constituion of The Republic of Ecuador, 2008). Pasal ini sendiri berada dalam BAB II mengenai *Rights of the good way of living*. Selanjutnya, terdapat pasal tersendiri mengenai kedaulatan pangan, yakni pasal 281 yang menyatakan bahwa kedaulatan pangan sebagai “tujuan strategis dan kewajiban pemerintah untuk memastikan bahwa setiap orang, komunitas, masyarakat dan bangsa mencapai swasembada makanan yang sehat dan sesuai budaya, secara permanen ”

Keberhasilan integrasi agenda kedaulatan pangan ini tidak bisa dilepaspisahkan dari partisipasi aktif organisasi anggota *La Via Campesina* (LVC) di Ekuador baik sebelum referendum, penyusunan draft di Majelis Konstituante maupun mobilisasi yang dilakukan untuk mendukung referendum tersebut. Setidaknya terdapat empat organisasi anggota LVC yang memainkan peran kunci dalam proses politik ini, yakni: (1) *Federation of Peasant, Indigenous, and Black Organizations* (FENOCIN), (2) *National Federation of Agro-industrial Workers, Peasants, and Free Indigenes of Ecuador* (FENACLE), (3) *Eloy Alfaro National Peasant Confederation* (CNC), dan *Ecuadorean Indian Federation* (FEI) (Claeys, 2015; Endicott, 2020; Via Campesina, 2020). Sejumlah studi terdahulu telah menempatkan LVC sebagai aktor penting aktivisme gerakan petani di tingkat global dengan gagasan kedaulatan pangan sebagai isu sentral mereka. Studi Rosset (2018) misalnya menekankan evolusi perjuangan LVC dalam mendorong reformasi agrarian secara global selama 20 tahun belakangan berhadapan dengan dinamika baru finansiasiasi agribisnis dan industri ekstraktif, serta krisis kapitalisme. Sementara Claeys (2013) meyoroti artikulasi LVC mengenai wacana hak asasi manusia dalam perjuangannya menentang neoliberalisme di sektor pertanian. LVC dipandang berhasil mengkonstruksikan norma hak asasi manusia baru terkait hak masyarakat atas kedaulatan pangan dan hak petani. Konstruksi norma tersebut pada gilirannya ikut mendorong terciptanya norma baru di tingkat global dengan diakuinya hak-hak petani dan kedaulatan pangan dalam *UN Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas* pada tahun 2018 (Claeys & Edelman, 2020). Penelitian lain berfokus pada perspektif legal mengenai kedaulatan pangan yang tertuang dalam konstitusi Ekuador dan Bolivia (Sina, 2018), meskipun tidak secara khusus membahas dinamika dan proses politik yang memungkinkan integrasi gagasan kedaulatan pangan ke dalam konstitusi di dua negara tersebut. Dengan pengecualian studi Sina, berbagai literatur tersebut berhasil mengelaborasi signifikansi LVC dalam memajukan isu kedaulatan pangan di tingkat global, akan tetapi belum menggambarkan secara jelas bagaimana perjuangan agenda kedaulatan pangan organisasi-

organisasi anggota LVC di tingkat nasional. Padahal, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, terdapat sejumlah negara yang telah mengadopsi konsep kedaulatan pangan ke dalam konstitusi dan undang-undang nasional mereka. Oleh karena itu, peneliti berusaha memperkaya berbagai studi tersebut dengan menganalisis perjuangan organisasi-organisasi petani anggota *La Via Campesina* di Ekuador sehingga berhasil mengintegrasikan agenda kedaulatan pangan ke dalam Konstitusi (undang-undang dasar) Ekuador. Sebagai catatan, terdapat penelitian lain sebenarnya telah berusaha untuk menganalisis dinamika perjuangan di tingkat nasional dengan mengangkat pengalaman Indonesia (Elake et al., 2022). Tentu saja, studi kasus-nya berbeda dengan penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sementara jenis penelitian adalah studi kasus. Menurut (Creswell, 2014), penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sementara menurut (Neuman, 2013) metode ini berusaha untuk memahami hakikat realitas sosial dan mengungkap bagaimana individu menyusun pemaknaan mereka atas satu hal.

Jenis penelitian studi kasus pada hakekatnya bertujuan untuk memahami konteks suatu peristiwa atau fenomena (Ellinger et al., 2005). Menurut Stake (1995) studi intensif menghasilkan deskripsi yang kaya tentang fenomena, peristiwa, organisasi, atau program. Studi kasus penelitian ini adalah keberhasilan *La Via Campesina* sebagai gerakan transnasional dalam memajukan agenda kedaulatan pangan di Ekuador. Sementara teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, yang dihimpun dari berbagai dokumen, literatur, artikel, dan berita yang relevan dengan penelitian. Menurut Bowen (2009), teknik pengumpulan data berbasis dokumen sebagai sumber utama bisa diterapkan dalam studi kasus. Bowen menjelaskan bahwa Segala jenis dokumen dapat membantu peneliti mengungkap makna, mengembangkan pemahaman, dan menemukan wawasan yang relevan dengan masalah penelitian. Oleh karena objek penelitian ini adalah organisasi petani di Ekuador yang sulit dijangkau oleh peneliti di Indonesia maka teknik studi dokumentasi ini memenuhi sejumlah kriteria Bowen untuk digunakan, yakni: efisien, ketersediaan, efektivitas biaya, dan keluasan cakupan. Kendati demikian, peneliti mengakui bahwa keterbatasan utama penelitian ini (berdasarkan kriteria Bowen) adalah kedalaman detail. Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis data melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedaulatan Pangan di Ekuador: Aktor dan Mobilisasi

Pendasaran teoritis penelitian ini adalah gerakan sosial dengan berfokus pada elemen mobilisasi sumberdaya jaringan. Menurut Sidney Tarrow (2011) gerakan sosial merupakan bagian dari *contentious politics* (politik perseteruan), yang mengemuka ketika orang-orang biasa – seriangkali dalam sebuah aliansi dengan kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh berikut perubahan-perubahan dalam suasana batin masyarakat – bergabung dalam konfrontasi dengan elit, otoritas dan lawan. *Contentious politics* terjadi ketika perubahan-perubahan kesempatan politik (juga hambatan) menciptakan dorongan bagi aktor yang tidak memiliki sumberdaya untuk melancarkan aksi kolektif. Lebih lanjut, salah satu elemen penting dalam memahami perkembangan gerakan sosial adalah struktur mobilisasi, yang mengacu pada kemampuan organisasi dalam memobilisasi jaringan dan sumberdaya.

Fungsi organisasi dalam struktur mobilisasi adalah menyediakan anggota, kepemimpinan, komunikasi dan jaringan sosial bagi pembangunan gerakan sosial. Beberapa contoh diantaranya adalah gereja, komunitas dan organisasi non-profit, kelompok mahasiswa dan kampus (sekolah) (Caren, 2007). Jaringan sosial tersebut merupakan sumberdaya bagi gerakan

Gunawan Lestari Elake, Ferdiansyah R, Retno Susilowati.

Keberhasilan *La Via Campesina* sebagai Gerakan Petani Transnasional dalam Memajukan Agenda Kedaulatan Pangan di Ekuador

untuk mempertahankan dan memperluas Gerakan (Foweraker, 1995). Sumberdaya tersebut mencakup sumberdaya material, kapasitas organisasi dan taktik yang memungkinkan terciptanya mobilisasi dukungan (Smith & Fetner, 2009). Semakin luas jaringan sosial yang tercipta sangat mempengaruhi tingkat mobilisasi dalam memperjuangkan agenda politik gerakan sosial. Dalam konteks tersebut, elaborasi akan difokuskan pada sejumlah organisasi anggota La Via Campesina di Ekuador, sumber daya jaringan (aliansi) yang terbentuk untuk memajukan agenda kedaulatan pangan serta keterlibatan mereka

Secara umum, terdapat tiga organisasi gerakan petani di Ekuador yang memainkan peran penting dalam memajukan agenda kedaulatan pangan sejak akhir 1990-an. Tentu saja, organisasi-organisasi ini merupakan organisasi anggota La Via Campesina di Ekuador. Pertama, FENOCIN (*Federation of Peasant, Indigenous, and Black Organizations*). Berdiri pada tahun 1968, FENOCIN merupakan federasi petani terbesar di Ekuador yang menyatukan berbagai kelompok sosial yang berbeda dalam kerangka perjuangan petani. Secara historis, organisasi ini mengalami sejumlah transformasi ideologis dan ruang lingkup organisasinya. Pada awalnya bernama FENOC (*Federation of Peasant*) yang merujuk pada kelas petani sebagai komposisi utamanya, kemudian berubah menjadi FENOC-I (*Federation of Peasant and Indigenous*) pada 1988 dengan memasukan isu etnis dan keragaman budaya (interkulturalisme) ke dalam agenda perjuangan kelas petani, dan sejak tahun 1997 bernama FENOCIN untuk menjangkau partisipasi kelompok sosial Afro-Ekuador ke dalam organisasi (Edelman, 2017; FENOCIN, 2021). Pergeseran terakhir ini merupakan terobosan penting dalam konteks isu identitas dan keterwakilan orang kulit hitam, yang secara historis menempati kedudukan paling rendah dalam stratifikasi sosial di Ekuador (Walsh, 2009). Federasi ini menghimpun sekitar 1300 organisasi anggota dan 2200 komunitas lokal yang mencakup lebih dari 500 ribu keluarga, dan memiliki perwakilan pada 20 provinsi di Ekuador. Federasi ini berhasil membangun aliansi yang stabil dan bertahan lama antara masyarakat adat-petani di dataran tinggi, petani pesisir, keturunan Afro dan, dalam derajat tertentu, kelompok indigenous di Amazon.

Organisasi kedua adalah CNC (*Eloy Alfaro National Peasant Confederation*). Berdiri pada tahun 1992, organisasi ini aktif mempromosikan aliansi petani dan masyarakat adat. Agenda politik utamanya adalah akses terhadap tanah, factor produksi dan pasar yang adil bagi petani serta pembangunan pedesaan yang mencakup adanya jaminan sosial, akses atas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di pedesaan. Organisasi ini terlibat aktif dalam mobilisasi-mobilisasi menentang kebijakan neo-liberal di Ekuador sepanjang tahun 1990-an (Edelman, 2017; Peña, 2016). Bersama-sama CONAIE (*Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador*), salah satu organisasi adat penting di Ekuador, CNC berkontribusi penting terhadap berdirinya Partai Pachakutik pada tahun 1995, sebuah partai politik dengan visi memajukan kepentingan masyarakat adat (*indigenous*) di Ekuador (Edelman, 2017). Terakhir adalah FENACLE (*National Federation of Agro-industrial Workers, Peasants, and Free Indigenous of Ecuador*). Organisasi ini didirikan pada tahun 1969 dan berbasis pada sektor pedesaan. Aktif mempromosikan redistribusi tanah melalui agenda reforma agraria, dan fokus mengadvokasi hak-hak pekerja di pedesaan dan kepentingan petani tanpa tanah (FENACLE, n.d.).

Afiliasi ketiga organisasi tersebut dengan La Via Campesina menjadikan agenda kedaulatan pangan sebagai agenda utama perjuangan mereka di tingkat nasional. Secara spesifik, FENOCIN merupakan salah satu perwakilan organisasi tani yang ikut terlibat dalam pendirian La Via Campesina di Mons, Belgia pada tahun 1994. FENOCIN juga terlibat dalam Konferensi Internasional La Via Campesina Kedua di Tlaxcala Meksiko (1996), yang menghasilkan salah satu kesepakatan penting yakni, agenda kampanye global kedaulatan pangan sebagai alternatif terhadap wacana dominan rezim pangan global saat itu: keamanan pangan (La Via Campesina, 2007). Ketiga organisasi ini juga terhubung jaringan gerakan petani di tingkat kawasan Amerika Latin yakni CLOC (*Latin American Coordination of Rural*

Organizations). Konteks kemunculan CLOC adalah rangkaian protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai gerakan petani dan masyarakat adat di kawasan tersebut melalui agenda *Continental Campaign 500 Years of Indigenous Resistance, Black and Popular* antara tahun 1989 dan 1992 sebagai respon terhadap peringatan 500 tahun kedatangan Spanyol di kawasan Amerika Latin. Secara umum, CLOC sendiri memiliki dua peran, yakni: (a) menghubungkan berbagai organisasi gerakan pedesaan di kawasan tersebut, dan (b) sebagai sarana dialog dan partisipasi berbagai organisasi tersebut yang terhubung dengan La Via Campesina (Desmarais et al., 2014; Edelman, 2017).

Selain kampanye dan mobilisasi dalam memajukan agenda kedaulatan pangan, organisasi-organisasi petani tersebut juga mengembangkan berbagai praktik pertanian berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan pangan, dan mendesiminasikan praktik-praktik tersebut melalui apa yang disebut dialog pengetahuan (*dialogo de seberes*). Dengan cara ini, berbagai organisasi tersebut berkontribusi dalam menyebarluaskan praktik-praktik pertanian berbasis kedaulatan pangan seperti: pertanian agro-ekologis, diversifikasi sistem pertanian, pertanian organik, sistem tumpang-sari dan agroforestri di Ekuador. Organisasi-organisasi tersebut juga aktif mempromosikan tata kelola pertanian alternatif berbasis *agrobiodiversity* dan bank benih, sistem pertanian terpadu (kombinasi tanaman dan hewan ternak dalam satu kegiatan usaha pertanian), serta substitusi dan pengurangan bahan kimia pertanian (Edelman, 2017; Peña, 2016). Tujuan utama dari praktik-praktik ini adalah mengurangi ketergantungan petani terhadap input eksternal, peningkatan otonomi petani, penguatan solidaritas dan kerjasama sosial, dan menjaga kelestarian alam. Organisasi-organisasi tersebut juga secara konsisten menyelenggarakan pelatihan kepada petani terkait beragam isu. Isu produksi agro-ekologi (dijalankan oleh FENOCIN), pendidikan formal masyarakat pedesaan (CNC), dan pelatihan kepemimpinan politik (FENOCIN, CNC dan FENACLE) (Edelman, 2017; Henderson, 2017).

Politisasi kedaulatan pangan oleh organisasi-organisasi tani tersebut tidak bisa dilepaspisahkan dari mobilisasi gerakan petani (demonstrasi dan protes) yang mengemuka sepanjang tahun 1980-an sampai 1990-an. Mobilisasi tersebut menentang kebijakan neoliberal yang dianggap menjadi penyebab bagi marjinalisasi petani dan masyarakat adat serta kerusakan lingkungan pada umumnya. Meskipun secara sosio-kultural sangat beragam dengan agrobiodiversitas yang kaya, pembangunan pertanian di Ekuador mengadopsi ‘resep umum’ modernisasi pertanian berbasis Revolusi Hijau dan monokultur di bawah anjuran rezim internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (Clark, 2016). Tentu saja, pada awalnya Ekuador diuntungkan oleh modernisasi pertaniannya. Namun pada perkembangannya, berbagai masalah sosial, ekonomi dan lingkungan muncul. Erosi tanah dalam skala besar, hilangnya sumber daya genetik lokal, penurunan keanekaragaman hayati pertanian, masalah hama dan kesehatan masyarakat akibat penggunaan pestisida, serta sistem finansial dan mekanisme pasar yang merugikan petani kecil (Arce et al., 2015). Dampak lainnya adalah, hilangnya akses petani dan masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya alam (Goodwin, 2017). Secara umum, kebijakan neoliberal di sektor pangan dan pertanian di Ekuador mengakibatkan penurunan drastis dukungan pemerintah terhadap petani, privatisasi tanah dan berfokus pada teknologi padat modal.

Salah satu implikasi penting dari pengalaman mobilisasi tersebut adalah terbentuknya aliansi di tingkat nasional yang menghubungkan berbagai organisasi petani tersebut di atas, yakni *coordinadora Nacional Agraria* (CNA) pada awal tahun 1990-an. Pada perkembangannya CNA kemudian berubah nama menjadi Mesa Agraria (MA). Mesa Agraria menjadi front persatuan perjuangan dan sarana kelembagaan penting bagi gerakan sosial pedesaan tersebut untuk mengartikulasikan tuntutan-tuntutan serta memajukan proposal kebijakan alternatif kepada negara (Edelman, 2017). Meskipun pada kenyataannya, organisasi-organisasi petani di Ekuador memiliki perbedaan orientasi, visi dan strategi bahkan terkadang bertentangan, melalui aliansi ini mereka memiliki kapasitas untuk menyatukan tujuan-tujuan

Gunawan Lestari Elake, Ferdiansyah R, Retno Susilowati.

Keberhasilan La Via Campesina sebagai Gerakan Petani Transnasional dalam Memajukan Agenda Kedaulatan Pangan di Ekuador

bersama. Agenda kedaulatan pangan nampaknya merupakan isu utama yang mampu menyatukan organisasi-organisasi ini.

Antara tahun 2001-2006, aliansi ini terlibat aktif dalam berbagai demonstrasi dan kampanye nasional menentang Kesepakatan Perdagangan Bebas (FTAA) antara Ekuador dan Amerika Serikat (Jameson, 2011). Kondisi ini makin memperkuat soliditas aliansi dan memungkinkan terbukanya debat dan dialog internal antara organisasi-organisasi anggota untuk agenda bersama. Hasilnya adalah terbitnya *Agrarian Agenda*, sebuah dokumen yang mempromosikan kedaulatan pangan, program perjuangan dan pentingnya akses terhadap faktor-faktor produksi. Menjelang pemilu 2006, Mesa Agraria menginisiasi dialog dengan sejumlah calon dan mengajukan proposal terkait agenda agraria nasional. Puncaknya adalah keputusan Mesa Agraria untuk mendukung Rafael Correa dalam pemilu presiden. Keputusan ini didasarkan pada janji dan komitmen Correa – jika terpilih – untuk mendukung ‘Revolusi Agraria’ yang mencakup tiga elemen penting, yakni: redistribusi tanah, mencegah privatisasi air dan mendorong akses petani terhadap sumber daya strategis (Clark, 2016; Edelman, 2017; Henderson, 2017).

Dalam derajat tertentu, dukungan terhadap Correa dipengaruhi oleh visi politiknya yang mengemuka selama kampanye presiden. Correa memosisikan dirinya sebagai anti-tesis dari elit (dan partai) politik mapan dan korup, penentangannya terhadap imperialisme Amerika Serikat dan agenda neo-liberalisme di Ekuador, peningkatan belanja sosial terutama bagi masyarakat miskin melalui reformasi industri minyak dan restrukturisasi utang (Mazzolini, 2021). Salah satu komitmen penting selama masa kampanye tersebut adalah janjinya untuk melaksanakan referendum nasional pembentukan majelis kontituante (*constituent assembly*) yang berfungsi untuk menulis ulang konstitusi baru Ekuador. Dengan dukungan populer yang kuat (termasuk yang datang dari organisasi-organisasi petani), Rafael Correa akhirnya memenangkan pemilihan presiden di akhir tahun 2006, dan menjadi presiden ke-45 Ekuador (BBC, 2007).

Institusionalisasi Agenda Kedaulatan Pangan ke dalam Konstitusi Baru Ekuador

Kemenangan Rafael Correa membuka kesempatan politik yang lebih luas bagi gerakan petani untuk memajukan agenda reforma agraria, termasuk kedaulatan pangan. Sepanjang tahun 2007, mayoritas organisasi petani di Ekuador terlibat aktif mendukung kampanye referendum pembentukan majelis konstituante. Hasilnya, sekitar 87 persen pemilih menyatakan setuju dalam referendum yang diselenggarakan pada April 2007. Selanjutnya, pada September 2007 pemilihan delegasi majelis kontituante diselenggarakan. PAIS (*Proud and Sovereign Homeland*) Alliance, partai yang didirikan Correa ketika bertarung dalam pemilu presiden, menang telak dalam pemilihan tersebut (berhasil mendapatkan 80 kursi dari 130 kursi di majelis konstituante) (Romero, 2007). Menariknya, pemimpin FENOCIN (Pedro De La Cruz) dan FENACLE (Guillermo Tourma) merupakan dua tokoh yang juga terpilih sebagai delegasi dalam proses tersebut. Keterlibatan langsung representasi organisasi petani inilah yang nanti memainkan peran penting institusionalisasi kedaulatan pangan dalam Konstitusi Ekuador 2008 (Peña, 2016).

Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan oleh organisasi-organisasi petani (yang juga tergabung dalam Mesa Agraria) untuk bekerjasama dengan anggota Majelis Konstituante dalam mengintegrasikan agenda kedaulatan pangan ke dalam konstitusi baru. Sejumlah komite dibentuk untuk memberikan masukan kepada anggota majelis konstituante. FENOCIN berpartisipasi dalam Komite Kebijakan Publik dan Komite Agraria (bersama-sama FENCALE), sementara CNC terlibat aktif dalam komite kedaulatan pangan. Komite-komite ini memiliki pengaruh penting dalam *final drafting* ketentuan kedaulatan pangan. Sebagai contoh, Komite Agraria menyusun laporan setebal 64 halaman dengan lima rekomendasi utama untuk konstitusi baru. Rekomendasi tersebut adalah (1) menjamin kedaulatan pangan, (2)

mendorong reformasi agraria, (3) mengembangkan model pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berkeadilan, (4) menjamin hak petani, dan (5) terus mempertahankan kedaulatan bangsa yang berbasis interkulturalisme. Pedro de la Cruz (representasi FENOCIN di Majelis Konstituante) memainkan peran penting dalam memajukan rekomendasi tersebut ke dalam konstitusi (Clark, 2016; Peña, 2016).

Sementara itu, disaat bersamaan, organisasi-organisasi tersebut mengadakan dialog partisipatif dan deliberatif melalui sejumlah forum di tingkat regional dan lokal yang bertujuan untuk menyusun proposal bersama yang nanti diajukan dalam proses politik di Majelis Konstituante. Sejumlah dialog tersebut menghasilkan ‘ide-ide utama’ yang seharusnya mengemuka dalam konstitusi baru, seperti isu kedaulatan dan keamanan pangan, pembangunan pedesaan dan kesetaraan hak-hak pekerja. Organisasi seperti FENOCIN misalnya mengajukan proposal yang berjudul ‘FENOCIN: *For a National Agrarian Plan and Interculturality*’ dengan penekanan tentang pentingnya ‘jaminan kedaulatan pangan di dalam konstitusi’. Proposal ini sepenuhnya berbasis pada konsep kedaulatan pangan oleh La Via Campesina yang mencakup ‘produksi pertanian nasional, mengembangkan sistem agro-ekologi dan menghindari ketergantungan terhadap produk impor, mendorong dan melindungi petani, produsen kecil dan menengah serta komunitas melalui akses terhadap tanah, air dan kebutuhan dasar lainnya untuk produksi pangan yang sehat, layak, cukup dan memadai’ (Flores et al., 2018). Selain itu, FENOCIN mendukung orientasi produksi pertanian yang berfokus pada pemenuhan pasar domestik, pentingnya pengetahuan tradisional sebagai basis pengembangan agroekologi, dan penguatan perencanaan pedesaan yang partisipatoris (Intriago et al., 2017).

Diluar proses politik yang berkembang pada Majelis Konstituante, berbagai *event* diselenggarakan oleh jaringan organisasi petani untuk menggalang opini publik sekaligus memberi ‘tekanan dari luar’ kepada anggota-anggota majelis. Acara-acara tersebut adalah kampanye, diskusi dan festival makanan dan benih yang diselenggarakan di sekitar gedung pertemuan. Salah satu acara yang monumental adalah ‘Festival Kedaulatan Pangan’ (7 Mei 2008), dimana jaringan organisasi petani (Mesa Agraria) memamerkan makanan dan benih, menyebarkan pamflet, dan menawarkan berbagai macam variasi makanan yang ada di negara tersebut kepada anggota Majelis Konstituante, wartawan dan masyarakat. Sekitar 500 orang berpartisipasi dalam acara ini, dan menjadi momen penting dalam perjuangan gerakan petani untuk kedaulatan pangan di Ekuador (Edelman, 2017).

Berbagai mobilisasi jaringan organisasi petani sepanjang proses penulisan konstitusi baik ‘dari dalam’ (melalui perwakilan mereka di Majelis Konstituante) maupun ‘dari luar’ (diskusi, dialog, lobi, kampanye, proposal kedaulatan pangan, dan festival-festival) pada akhirnya berhasil mengintegrasikan agenda kedaulatan pangan pada Konstitusi Baru Ekuador. Setelah melalui mekanisme referendum konstitusi di akhir September 2008 (68 persen pemilih setuju dengan draft konstitusi), konstitusi baru ini akhirnya berlaku secara efektif, dan secara umum mengadopsi isu kedaulatan pangan yang diadvokasi oleh jaringan gerakan petani di Ekuador. Sejumlah pasal dalam konstitusi ini memuat secara lugas mengenai kedaulatan pangan termasuk kewajiban negara dan pemerintah. Sebagai contoh, pasal 281 yang menyatakan bahwa kedaulatan pangan sebagai “tujuan strategis dan kewajiban pemerintah untuk memastikan bahwa setiap orang, komunitas, masyarakat dan bangsa mencapai swasembada makanan yang sehat dan sesuai budaya, secara permanen ” (Constitution of The Republic of Ecuador, 2008). Pasal ini juga merinci strategi dan tanggung jawab negara ke dalam beberapa ayat, diantaranya adalah (Constitution of The Republic of Ecuador, 2008):

1. Mendorong swasembada pangan yang lebih besar;
2. Mengadopsi kebijakan fiskal, pajak dan tarif yang melindungi sektor pertanian dan perikanan nasional guna mencegah ketergantungan pada impor pangan;
3. Mendukung diversifikasi dan pemanfaatan teknologi ekologi dan organik dalam produksi pertanian dan peternakan;

Gunawan Lestari Elake, Ferdiansyah R, Retno Susilowati.

Keberhasilan La Via Campesina sebagai Gerakan Petani Transnasional dalam Memajukan Agenda Kedaulatan Pangan di Ekuador

4. Mempromosikan kebijakan redistribusi yang memungkinkan petani kecil memiliki akses ke tanah, air, dan sumber daya produksi lainnya.
5. Menetapkan mekanisme preferensial untuk pembiayaan produsen kecil dan menengah, memfasilitasi mereka untuk memperoleh alat produksi.
6. Mempromosikan agro-ekologis dan penggunaan benih secara gratis;
7. Larangan praktek monopoli dan spekulatif seputar pangan;
8. Ekonomi yang adil dan hubungan langsung antara produsen dan konsumen.

Dengan demikian, perjuangan La Via Campesina melalui organisasi anggotanya di Ekuador dapat dikatakan berhasil. Ini adalah pencapaian terbesar institusionalisasi agenda kedaulatan pangan di tingkat nasional, sekaligus menjadi pengalaman bagi gerakan sosial pada umumnya bahwa kapasitas organisasi memanfaatkan ruang-ruang politik yang tersedia menjadi syarat mutlak keberhasilan suatu gerakan memajukan agenda-agenda politiknya.

SIMPULAN

Keberhasilan perjuangan organisasi-organisasi petani anggota La Via Campesina (LVC) di Ekuador dalam mengintegrasikan isu kedaulatan pangan ke dalam Konstitusi Ekuador 2008 merefleksikan beberapa hal penting. *Pertama*, peran LVC sebagai aktor petani di tingkat global sangat elementer disini, yakni mendesiminasi gagasan dan konsep kedaulatan pangan di tingkat global, sekaligus menyatukan isu dan tuntutan bersama yang menjadi *point of reference* bagi perjuangan di tingkat lokal. *Kedua*, kapasitas organisasi di tingkat lokal merupakan kunci untuk mematerialisasi agenda-agenda global tersebut. Dalam kasus Ekuador diatas, kapasitas organisasi petani nasional dalam memobilisasi jaringan sumberdaya melalui pendidikan dan pelatihan, aliansi, diskusi publik, dan pemajuan proposal terkait kedaulatan pangan menjadi faktor penting yang mendeterminasi keberhasilan tersebut. *Ketiga*, perjuangan dengan memanfaatkan ruang-ruang politik kekuasaan adalah hal penting disini. Mobilisasi dan partisipasi langsung dalam *legal drafting* proses penulisan konstitusi melalui representasi gerakan petani di Majelis Konstituante terbukti berhasil mengawal agenda-agenda konstitusi. Dukungan dan mobilisasi terhadap Rafael Correa semenjak proses pemilihan presiden sampai referendum konstitusi justru menciptakan kesempatan politik yang luas dan sumberdaya yang besar bagi gerakan sosial. Dalam pengertian ini, pelajaran penting dari kasus ini adalah, gerakan sosial tidak hanya berhenti sebagai aktor 'di luar' kekuasaan yang hanya menjadi 'watch dog' tetapi juga mampu mengeksplisitkan agenda-agenda-nya dari 'dalam'.

DAFTAR PUSTAKA

- Arce, A., Sherwood, S., & Paredes, M. (2015). Repositioning food sovereignty: Between Ecuadorian nationalist and cosmopolitan politics. *In Food Sovereignty in International Context* (pp. 135–152). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315764429-17>
- Baylis, J., Owens, P., & Smith, S. (2017). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford University Press. <https://philpapers.org/rec/BAYTG O-7>
- BBC. (2007). *Ecuador swears in new president*. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6262555.stm>
- Borras Jr, S. M., Franco, J. C., & Suárez, S. M. (2015). Land and food sovereignty. *Third World Quarterly*, 36(3), 600–617. <https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1029225>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>

- Caren, N. (2007). Political process theory. *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*. <https://doi.org/10.1002/9781405165518>
- Claeys, P. (2013). From Food Sovereignty to Peasants' Rights: An overview of La Via Campesina's Rights-based claims over the last 20 years. *Food Sovereignty: A Critical Dialogue*. https://dial.uclouvain.be/downloader/downloader.php?pid=boreal:137348&dastream=PDF_01
- Claeys, P. (2015). *Human rights and the food sovereignty movement: Reclaiming control*. Routledge. <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB17930857>
- Claeys, P., & Edelman, M. (2020). The United Nations Declaration on the rights of peasants and other people working in rural areas. *The Journal of Peasant Studies*, 47(1), 1–68. <https://doi.org/10.1080/03066150.2019.1672665>
- Clark, P. (2016). Can the State Foster Food Sovereignty? Insights from the Case of Ecuador. *Journal of Agrarian Change*, 16(2), 183–205. <https://doi.org/10.1111/joac.12094>
- Constituion of The Republic of Ecuador. (2008). *Constituion of The Republic of Ecuador*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE. <https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40>
- Desmarais, A. A., Rivera-Ferre, M. G., & Gasco, B. (2014). Building alliances for food sovereignty: La Vía Campesina, NGOs, and social movements. In *Alternative agrifood movements: Patterns of convergence and divergence*. Emerald Group Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/s1057-192220140000021009>
- Dunford, R. (2016). *The Politics of Transnational Peasant Struggle: Resistance, Rights and Democracy*. Rowman & Littlefield. <https://eprints.brighton.ac.uk/15729/>
- Edelman, M. (2017). *Critical Perspectives on Food Sovereignty: Global Agrarian Transformations*, Volume 2. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315689562>
- Edelman, M., & Borras, S. M. (2016). *Political Dynamics of Transnational Agrarian Movements*. Practical Action Publishing, Fernwood Publishing. <https://doi.org/10.3362/9781780449142>
- Elake, G. L., Susilowati, R., & Ferdiansyah, R. (2022). Aktivisme Petani Transnasional: Perjuangan La Via Campesina dan Serikat Petani Indonesia untuk Kedaulatan Pangan. *Media Bina Ilmiah*, 17(5), 925–938. <https://doi.org/10.33578/mbi.v17i5.219>
- Ellinger, A. D., Watkins, K. E., & Marsick, V. J. (2005). *Case study research methods. Research in organizations: Foundations and methods of inquiry*. Berrett-Koehler Publishers.
- Endicott, S. (2020, December 17). 17 South American Groups Striving for Food and Land Rights. *Food Tank*. <https://foodtank.com/news/2020/12/movements-in-south-america-fighting-for-food-and-land-sovereignty/>
- European Cordination Via Campesina. (2018). *Food Sovereignty NOW! A Guide to Food Sovereignty*. European Cordination Via Campesina.

- FENACLE. (n.d.). *FENACLE – FENACLE*. Retrieved August 20, 2021, from <http://www.fenacle-ecuador.org/fenacle/>
- FENOCIN. (2021). *Causa Nuestra | FENOCIN*. <https://www.fenocin.org/informacion-institucional/quienes-somos/>
- Flores, A. M., Ruivenkamp, G., & Jongerden, J. (2018). Drafting a law, dissolving a proposal: Food sovereignty and the state in Ecuador. *Agrarian South: Journal of Political Economy*, 7(3), 351–380. <https://doi.org/10.1177/2277976018800590>
- Foweraker, J. (1995). *Theorizing Social Movements*. Pluto Press. [https://doi.org/10.1016/0261-3050\(96\)89762-2](https://doi.org/10.1016/0261-3050(96)89762-2)
- Goodwin, G. (2017). The quest to bring land under social and political control: Land reform struggles of the past and present in Ecuador. *Journal of Agrarian Change*, 17(3), 571–593. <https://doi.org/10.1111/joac.12181>
- Henderson, T. P. (2017). State–peasant movement relations and the politics of food sovereignty in Mexico and Ecuador. *The Journal of Peasant Studies*, 44(1), 33–55. <https://doi.org/10.1080/03066150.2016.1236024>
- Hobsbawm, E. J. (1996). *The Age of Extremes: A History of the World, 1914-1991*. Vintage Books. <https://doi.org/10.2307/20047214>
- Intriago, R., Gortaire Amézcuca, R., Bravo, E., & O’Connell, C. (2017). Agroecology in Ecuador: Historical processes, achievements, and challenges. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 41(3–4), 311–328. <https://doi.org/10.1080/21683565.2017.1284174>
- Jameson, K. P. (2011). The Indigenous Movement in Ecuador: The Struggle for a Plurinational State. *Latin American Perspectives*, 38(1), 63–73. <https://doi.org/10.1177/0094582x10384210>
- Kautsky, K. (1988). *The Agrarian Question*. Zwan Publications. <https://doi.org/10.1080/03066159008438422>
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1999). Transnational advocacy networks in international and regional politics. *International Social Science Journal*, 51(159), 89–101. <https://doi.org/10.1111/1468-2451.00179>
- La Via Campesina. (2007, September 20). *II International Conference Of The Via Campesina Tlaxcala, Mexico, April 18-21: Via Campesina*. Via Campesina English. <https://viacampesina.org/en/ii-international-conference-of-the-via-campesina-tlaxcala-mexico-april-18-21/>
- La Via Campesina. (2022). *About La Via Campesina: Via Campesina*. La Via Campesina - EN. <https://viacampesina.org/en/international-peasants-voice/>
- Martínez Dalmau, R. (2016). Democratic constitutionalism and constitutional innovation in Ecuador: The 2008 Constitution. *Latin American Perspectives*, 43(1), 158–174. <https://doi.org/10.1177/0094582X15571277>

- Mazzolini, S. (2021). Rafael Correa and the Citizen's Revolution in Ecuador. *Populism in Global Perspective: A Performative and Discursive Approach*.
- Neuman, W. L. (2013). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education. <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Peña, K. (2016). Social movements, the state, and the making of food sovereignty in Ecuador. *Latin American Perspectives*, 43(1), 221–237. <https://doi.org/10.1177/0094582x15571278>
- Romero, S. (2007, February 14). Ecuador: Congress Approves Referendum on Constitutional Assembly. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2007/02/14/world/americas/14briefs-ecuadorassembly.html>
- Rosset, P. (2013). Re-thinking agrarian reform, land and territory in La Via Campesina. *The Journal of Peasant Studies*, 40(4), 721–775. <https://doi.org/10.1080/03066150.2013.826654>
- Rosset, P. (2018). Evolution of the struggle for land and territory in La Via Campesina International. In *Reframing Latin American Development* (pp. 164–182). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315170084-9/evolution-struggle-land-territory-la-via-campesina-international-peter-rosset>
- Sina, A. (2018). The Constitutional Protection of the Right to Food in Bolivia and Ecuador. In A. Isoni, M. Troisi, & M. Pierri (Eds.), *Food Diversity Between Rights, Duties and Autonomies: Legal Perspectives for a Scientific, Cultural and Social Debate on the Right to Food and Agroecology* (pp. 265–275). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75196-2_16
- Smith, J., & Fetner, T. (2009). Structural Approaches in the Sociology of Social Movements. In B. Klandermans & C. Roggeband (Eds.), *Handbook of Social Movements Across Disciplines*. Springer Science & Business Media. https://doi.org/10.1007/978-0-387-70960-4_2
- Stake, R. E. (1995). *The Art of Case Study Research*. SAGE. <https://doi.org/10.2307/329758>
- Tarrow, S. (2011). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics* (3 edition). Cambridge University Press.
- Via Campesina. (2020). *Via Campesina*. Via Campesina English. <https://viacampesina.org/en/who-are-we/regions/south-america/>
- Walsh-Dilley, M., Wolford, W., & McCarthy, J. (2016). Rights for resilience: Food sovereignty, power, and resilience in development practice. *Ecology and Society*, 21(1) <https://doi.org/10.5751/es-07981-210111>